

ABSTRAK

Perjudian merupakan tindak pidana yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan moral masyarakat di Kabupaten Pemalang. Meskipun Pasal 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974 telah tersedia, praktik perjudian tetap marak bahkan bertransformasi ke ranah digital (*online*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi pengaturan hukum tindak pidana perjudian dalam sistem hukum positif Indonesia serta menilai efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut di wilayah Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Serta, didukung oleh pendekatan yuridis empiris terbatas melalui studi kepustakaan dan wawancara untuk memperoleh gambaran pelaksanaan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan kasus perjudian periode 2023–2025 mengalami fluktuasi dengan tingkat penyelesaian perkara relatif tinggi, termasuk mencapai 100% pada tahun 2024. Namun, Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sinergi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Disimpulkan bahwa penegakan hukum di Kabupaten Pemalang telah menunjukkan komitmen serius namun perlu strategi yang lebih komprehensif daripada sekadar tindakan represif. Disarankan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh sinergi struktur, substansi, dan budaya hukum, sehingga diperlukan strategi integratif yang tidak hanya represif tetapi juga preventif melalui peningkatan kapasitas aparat dan edukasi hukum masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Perjudian; Pemalang

ABSTRACT

Gambling constitutes a criminal offense that adversely affects the social, economic, and moral aspects of society in Pemalang Regency. Although Article 303 of the Indonesian Criminal Code and Law Number 7 of 1974 provide a clear legal framework prohibiting gambling, the practice remains prevalent and has increasingly shifted into the digital (online) sphere. This study aims to analyze the synchronization of gambling regulations within Indonesia's positive legal system and to assess the effectiveness of law enforcement against gambling offenses in Pemalang Regency. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by a limited empirical juridical approach through literature review and interviews to examine the practical implementation of the law. The findings indicate that gambling case disclosures during the 2023–2025 period fluctuated, with a relatively high case clearance rate, reaching 100% in 2024. However, the effectiveness of law enforcement is significantly influenced by the interplay between legal structure, legal substance, and legal culture. It is concluded that law enforcement authorities in Pemalang Regency have demonstrated institutional commitment; nevertheless, a more comprehensive strategy beyond repressive measures is required. An integrative approach combining repressive and preventive measures, including capacity building for law enforcement officers and enhanced public legal awareness, is therefore essential.

Keywords: *Law Enforcement; Gambling; Pemalang Regency.*